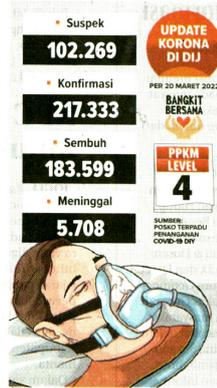




Penegakan Prokes dengan Sanksi Belum Jadi Opsi



Bangun Kesadaran secara Persuasif

JOGJA, Radar Jogja - Penegakan protokol kesehatan (prokes) dengan sanksi pidana belum menjadi opsi bagi Pemkot Jogja. Upaya masih sama dengan menekankan edukasi dan mendisiplinkan peningkatan pelaksanaan prokes. Paling mendasar, pemakaian masker tidak bisa diabaikan.

► Baca *Penegakan...* Hal 7

Jumlah total Tempat Tidur (TT) di RS Rujukan baik TT Critical maupun Non-Critical sebanyak **2.037** dengan rincian sebagai berikut:

TT CRITICAL	TT NON CRITICAL
• Ketersediaan: 198	• Ketersediaan: 1.839
• Penggunaan: 62	• Penggunaan: 487
• Sisa: 136	• Sisa: 1.352

Penegakan Prokes dengan Sanksi Belum Jadi Opsi

Sambungan dari hal 1

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, sejatinya pemberian sanksi memang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat. Tetapi, upaya Pemkot masih secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran agar masyarakat disiplin prokes di masa pandemi Covid-19 ini.

"Saya tidak mengatakan pada sanksinya harus pidana atau apa. Sanksi tersebut itu adalah potensi tertular dan menularkan penyakit. Itu yang harus dipahami," kata HS saat ditemui wartawan di Kompleks Balai Kota Timoho (18/3).

HS menjelaskan, salah satu prokes yang paling dasar perlu dilakukan dan ditingkatkan di masa pandemi adalah disiplin penggunaan masker. Masker sudah menjadi identitas utama dan harus diterapkan. Pada prinsipnya penegakan prokes di Kota Jogja lebih pada tingkat disiplin masyarakat saja. "Prokes itu pakai

masker yang paling dasar. Dia nggak pakai masker, ya kita kasih masker. Dah gitu aja," ujarnya.

Dengan demikian, Pemkot menjerjatkan petugas Satpol PP untuk mengajak masyarakat disiplin terhadap prokes. Setidaknya penggunaan masker itu.

"Orang gampang dilihat dia tidak disiplin prokes dari pakai masker. Jadi petugas Satpol PP kalau ke mana-mana pasti pegang stok masker," jelasnya.

Dikatakan, penegakan pelaksanaan prokes di masyarakat seharusnya tidak perlu lagi disertai dengan ancaman sanksi yang mengarah pidana, tetapi diarahkan pada upaya membangun kesadaran masyarakat. "Itu aja membangun kesadaran, bukan diancam. Saya minta bantuan agar disiplin. Kita ini kan pelayan publik ya kita melayani," tambahnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto mengatakan, bentuk pelanggaran prokes yang masih kerap ditemui di lapangan,

di antaranya tidak mengenakan masker atau tidak memakai masker dengan benar. "Sampai sekarang yang kami lakukan masih fokus pada edukasi agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika ada pelanggaran, ya kami lakukan teguran," katanya.

Agus menjelaskan sejauh ini melakukan patroli, personel selalu dibekali dengan masker yang akan diberikan kepada masyarakat atau wisatawan yang kedatangan tidak mengenakan masker. Dengan melakukan edukasi dan imbauan yang terus menerus, diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjalankan prokes.

Selain itu, pihaknya meminta pelaku usaha untuk segera melengkapi tempat usahanya dengan QR Code PeduliLindungi. "Masih banyak minimarket waralaba yang belum memilikinya. Alasannya karena seluruh perizinan dilakukan dari pusat," kata Agus. (**wia/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005